



## **HUBUNGAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ANGGARAN DPR TERHADAP TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA**

**Graschia Carroline Giselle<sup>1</sup>, Dina Nirmala<sup>2</sup>, Fitriana Selvia<sup>3</sup>, Ridha Ramadhany<sup>4</sup>, Rahmalia Wulan Azizah<sup>5</sup>, Edward Melio Bertho<sup>6</sup>**  
[gina.3563522@gmail.com<sup>1</sup>](mailto:gina.3563522@gmail.com)  
**Universitas Palangkaraya**

### **Abstrak**

Masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran DPR yang berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat Kota Palangka Raya. Tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi anggaran semakin meningkat, sementara akses terhadap informasi tersebut masih terbatas. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel 384 responden yang dipilih secara acak sederhana. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Data dianalisis menggunakan uji korelasi Pearson untuk mengukur hubungan antara variabel. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara transparansi dan akuntabilitas anggaran DPR dengan tingkat kepuasan masyarakat, dengan nilai korelasi sebesar 0,988 dan signifikansi 0,000. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran DPR akan berdampak langsung pada peningkatan kepuasan masyarakat Kota Palangka Raya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan keterbukaan informasi anggaran dan penguatan sistem akuntabilitas sebagai strategi untuk membangun kepercayaan publik.

**Kata Kunci:** Transparansi, Akuntabilitas Anggaran, Tingkat Kepuasan Masyarakat.

### **Abstract**

*The low level of transparency and accountability in the management of the House of Representatives (DPR) budget, which has an impact on the level of public satisfaction in Palangka Raya City. Public demands for information transparency are increasing, while access to such information remains limited. The research method used a quantitative approach with a sample of 384 respondents selected using a simple random sampling method. Data collection was carried out through a questionnaire whose validity and reliability have been tested. Data were analyzed using the Pearson correlation test to measure the relationship between variables. The results showed a very strong and significant relationship between the transparency and accountability of the DPR budget and the level of public satisfaction, with a correlation value of 0.988 and a significance level of 0.000. This finding indicates that increasing transparency and accountability in the management of the DPR budget will have a direct impact on increasing public satisfaction in Palangka Raya City. This study recommends the need to increase the transparency of budget information and strengthen the accountability system as a strategy to build public trust.*

**Keywords:** Transparency, Budget Accountability, Public Satisfaction Level.

## **PENDAHULUAN**

Anggaran negara merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di dalamnya pengelolaan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif (Anggreni, 2023). Sembiring & Fitriati (2025), DPR

bukan hanya memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan setiap penggunaan dana publik dilakukan secara transparan, akuntabel, serta membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Kurniadi & Sutabri (2025), dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan anggaran DPR khususnya terkait tunjangan dan fasilitas anggota dewan sering menjadi sorotan publik. Briyadi et al. (2025) meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga negara, termasuk lembaga legislatif.

Transparansi dan akuntabilitas DPR dinilai masih belum optimal (Avina, 2023). Berbagai laporan masyarakat menunjukkan bahwa informasi mengenai besaran tunjangan, rincian penggunaan anggaran, serta mekanisme evaluasi belum sepenuhnya mudah diakses public (Jayanti & Trisnainingsih, 2022). Wibowo & Susliyanti (2024), muncul pula kritik tentang pengelolaan tunjangan DPR yang dianggap tidak sebanding dengan kinerja atau kontribusi terhadap kepentingan rakyat. Minimnya akses informasi publik dan lemahnya pelaporan penggunaan anggaran sering memunculkan persepsi negatif, seperti anggapan bahwa DPR lebih mengutamakan kepentingan internal dibandingkan kesejahteraan masyarakat (Nurhidayati, 2023). Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislative (Kawatu et al., 2024).

Kota Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi anggaran semakin meningkat (Fathia, 2025). Masyarakat menuntut agar penggunaan anggaran oleh wakil rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat diketahui secara terbuka (Mariska et al., 2025). Warga Palangka Raya menginginkan adanya pelaporan yang jelas mengenai penggunaan tunjangan, termasuk apakah alokasi tersebut memberikan nilai tambah bagi pelayanan publik atau hanya bersifat konsumtif. Wulandari & Darma (2025), akses informasi mengenai penggunaan anggaran DPR bagi masyarakat umum masih terbatas. Jane & Pawitan (2025) Peran DPR dipertanyakan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggarannya.

Permasalahan lain adalah munculnya ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dan pengalokasian anggaran DPR (Hadi et al., 2024). Sebagian masyarakat menilai bahwa anggaran untuk tunjangan DPR terkesan terlalu besar jika dibandingkan dengan dampak langsung yang dirasakan public (Irawati et al., 2025). Kondisi ini memunculkan persepsi bahwa penggunaan anggaran belum mencerminkan kepentingan rakyat secara maksimal (Saffa et al., 2025). Rendahnya transparansi membuat publik sulit menilai apakah tunjangan tersebut benar-benar dikelola dengan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan (Aisyah et al., 2025). Ketidakjelasan ini pada akhirnya berdampak pada penilaian masyarakat terhadap kinerja DPR dan tingkat kepuasan mereka terhadap lembaga tersebut (Sedarmayanti, 2025).

Kepuasan masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai legitimasi dan kualitas pelayanan lembaga public (Achmad, 2025). Tingkat kepuasan masyarakat Kota Palangka Raya terhadap kinerja DPR sangat dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga tersebut menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara bertanggung jawab (Mursalin et al., 2024). Semakin transparan dan akuntabel penggunaan anggaran DPR, maka semakin tinggi pula potensi kepercayaan dan dukungan masyarakat. Sebaliknya, rendahnya keterbukaan informasi dapat menimbulkan kekecewaan, ketidakpercayaan, serta penilaian negatif terhadap lembaga legislative (Suryana et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran DPR dengan kondisi yang dirasakan saat ini. Keterbatasan akses informasi, minimnya pelaporan, dan persepsi negatif masyarakat menjadi permasalahan yang memerlukan pengkajian lebih mendalam. Penelitian mengenai Hubungan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran DPR terhadap

Tingkat Kepuasan Masyarakat Kota Palangka Raya sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana transparansi dan akuntabilitas anggaran DPR memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat, sekaligus menjadi masukan bagi peningkatan tata kelola anggaran lembaga legislatif.

## METODE

Metodologi penelitian ini bersifat kuantitatif dengan populasi sebesar 310.110 jiwa (BPS Kota Palangka Raya 2025) dan sampel ditetapkan sebanyak 384 responden berdasarkan tabel Krejcie & Morgan (Ali et al., 2022); pengambilan sampel dilakukan secara random sederhana untuk mewakili masyarakat Kota Palangka Raya. Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert (4 poin: STS, TS, S, SS) yang mengukur konstruk transparansi & akuntabilitas anggaran DPR (variabel X gabungan) dan tingkat kepuasan masyarakat (variabel Y); sebelum dianalisis, instrumen diuji kualitasnya melalui uji validitas (Corrected Item-Total Correlation / Pearson Product Moment) untuk memastikan setiap butir mengukur konstruk yang dimaksud dan uji reliabilitas (Cronbach's Alpha) untuk memastikan konsistensi internal skala (Hasnidar et al., 2025). Data yang lolos uji validitas dan reliabilitas kemudian dianalisis menggunakan Uji Korelasi Pearson di SPSS untuk mengukur arah, kekuatan, dan signifikansi hubungan antara variabel X dan Y (tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ ); seluruh proses pengumpulan data menjamin kerahasiaan identitas responden dan kepatuhan etika penelitian (Masita, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Karakteristik Responden

No	Kategori	Sub-Kategori	Jumlah	Persentase
<b>1</b>	<b>Usia</b>			
1.1	Usia	> 20 tahun	56	14,6%
1.2		20–30 tahun	172	44,8%
1.3		31–40 tahun	108	28,1%
1.4		> 41 tahun	48	12,5%
	<b>Total Usia</b>		<b>384</b>	<b>100%</b>
<b>2</b>	<b>Jenis Kelamin</b>			
2.1	Jenis Kelamin	Laki-laki	176	45,8%
2.2		Perempuan	208	54,2%
	<b>Total Jenis Kelamin</b>		<b>384</b>	<b>100%</b>
<b>3</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>			
3.1	Jenis Pekerjaan	Swasta/Wiraswasta	146	38,0%
3.2		PNS/BUMN/BUMD	102	26,6%
3.3		Pelajar/Mahasiswa	88	22,9%
3.4		Lain-lainnya	48	12,5%
	<b>Total Jenis Pekerjaan</b>		<b>384</b>	<b>100%</b>

Karakteristik responden dalam penelitian ini menunjukkan komposisi demografis yang beragam. Berdasarkan usia, sebagian besar responden berada pada rentang 20–30 tahun sebanyak 172 orang (44,8%), diikuti oleh kelompok usia 31–40 tahun sebanyak 108 orang (28,1%), kemudian responden berusia di bawah 20 tahun sebanyak 56 orang (14,6%), dan responden berusia di atas 41 tahun sebanyak 48 orang (12,5%). Dari sisi jenis kelamin, responden perempuan mendominasi dengan jumlah 208 orang (54,2%), sementara responden laki-laki berjumlah 176 orang (45,8%). Berdasarkan jenis pekerjaan, mayoritas responden bekerja sebagai swasta atau wiraswasta sebanyak 146 orang (38,0%), kemudian PNS/BUMN/BUMD sebanyak 102 orang (26,6%), pelajar atau mahasiswa sebanyak 88

orang (22,9%), dan kategori pekerjaan lainnya sebanyak 48 orang (12,5%). Secara keseluruhan, jumlah responden dalam penelitian ini adalah 384 orang.

### Uji Validitas

Variable x

No	Item	Corrected Item-Total Correlation (r-hitung)	r-tabel	Status
1	X1	0.969	0.334	VALID
2	X2	0.969	0.334	VALID
3	X3	0.968	0.334	VALID
4	X4	0.969	0.334	VALID
5	X5	0.958	0.334	VALID
6	X6	0.968	0.334	VALID
7	X7	0.967	0.334	VALID
8	X8	0.968	0.334	VALID

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel X memiliki nilai Corrected Item-Total Correlation (r-hitung) antara 0.958 sampai 0.969, yang jauh lebih besar daripada r-tabel sebesar 0.334 ( $N = 384, \alpha = 0.05$ ). Karena  $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ , maka setiap butir pernyataan dinyatakan VALID. Ini berarti seluruh item mampu mengukur konstruk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran secara tepat, konsisten, serta sesuai dengan teori yang mendasarinya. Dengan demikian, keseluruhan 8 item variabel X dapat digunakan dalam analisis selanjutnya tanpa harus dieliminasi.

Variable y

No	Item	Corrected Item-Total Correlation	r-tabel	Status
1	Y1	0.984	0.334	VALID
2	Y2	0.984	0.334	VALID
3	Y3	0.936	0.334	VALID
4	Y4	0.944	0.334	VALID
5	Y5	0.936	0.334	VALID
6	Y6	0.936	0.334	VALID

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel Y memiliki Corrected Item-Total Correlation (r-hitung) antara 0.936 sampai 0.984, yang seluruhnya jauh melampaui nilai r-tabel sebesar 0.334 ( $N = 384, \alpha = 0.05$ ). Karena seluruh  $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ , maka seluruh item dinyatakan VALID. Hal ini membuktikan bahwa enam butir pernyataan dalam variabel Y mampu mengukur konstruk Tingkat Kepuasan Masyarakat secara akurat dan konsisten. Dengan demikian, semua item Y1 hingga Y6 layak digunakan dalam analisis lebih lanjut tanpa adanya butir yang perlu dibuang.

### Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas	Hasil
Cronbach's Alpha	0.992
Jumlah Item (N of Items)	14
Keterangan	Reliabel ( $\alpha > 0,70$ )

Seluruh butir pernyataan pada variabel Transparansi & Akuntabilitas Anggaran (X) dan Tingkat Kepuasan Masyarakat (Y) menunjukkan konsistensi internal yang sangat tinggi, sehingga kuesioner ini stabil, konsisten, dan layak digunakan dalam penelitian.

Uji Korelasi Pearson

### Correlations

	Transparansi_Akuntabilitas_Anggaran	Tingkat_Kepuasan_Masyarakat
Transparansi_Akuntabilitas_Anggaran	1	.988**

	Sig. (2-tailed)		.000
	N	384	384
Tingkat_Kepuasan_Masyaraka	Pearson	.988**	1
t	Correlation		
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	384	384

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan bahwa variabel Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran DPR memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan dengan Tingkat Kepuasan Masyarakat Kota Palangka Raya, dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi  $r = 0.988$  dan nilai signifikansi  $0.000 < 0.05$ . Nilai korelasi yang mendekati 1 ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran DPR, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga tersebut. Hubungan yang sangat kuat ini juga mencerminkan bahwa masyarakat menilai keterbukaan informasi anggaran, kejelasan pertanggungjawaban, serta akuntabilitas proses anggaran sebagai aspek yang sangat penting dalam membangun kepercayaan terhadap DPR. Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas anggaran berkontribusi secara signifikan terhadap meningkatnya kepuasan masyarakat Kota Palangka Raya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik oleh DPR.

### **Pembahasan**

Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan bahwa variabel Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran DPR memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan dengan Tingkat Kepuasan Masyarakat Kota Palangka Raya, ditunjukkan oleh nilai  $r = 0.988$  dan nilai signifikansi  $0.000 < 0.05$ . Nilai korelasi yang mendekati 1 menegaskan bahwa semakin tinggi transparansi serta akuntabilitas dalam penyusunan, pengelolaan, dan pelaporan anggaran DPR, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja lembaga tersebut. Temuan ini konsisten dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa transparansi anggaran dan akuntabilitas publik berpengaruh kuat terhadap tingkat kepuasan masyarakat (Suryana et al., 2025). Teriraun et al. (2025) menemukan bahwa keterbukaan informasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan publik. Setiadi (2022) juga menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah meningkatkan kepuasan masyarakat. Hasil serupa disampaikan oleh Maulidiah (2025) bahwa transparansi anggaran berkontribusi positif dalam membangun kepuasan publik. Penelitian oleh Warsdapama et al. (2024) memperkuat bahwa akuntabilitas birokrasi berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah. Penelitian Sari et al. (2024) juga menunjukkan bahwa keterbukaan anggaran memengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Saifulloh et al. (2022) menegaskan bahwa akuntabilitas fiskal menjadi faktor kunci dalam menciptakan pemerintahan yang dipercaya publik. Sari et al. (2024) dan Achmad (2025) menemukan bahwa publik cenderung lebih puas ketika proses anggaran dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi. Prihartono (2023) menunjukkan bahwa transparansi kebijakan anggaran mendorong meningkatnya partisipasi dan kepuasan masyarakat. Hal senada disampaikan oleh Saifulloh et al. (2022), yang membuktikan bahwa akuntabilitas pengelolaan anggaran memperkuat persepsi positif warga terhadap lembaga legislatif. Penelitian Lutfie et al. (2025) menegaskan bahwa kepuasan masyarakat meningkat apabila pemerintah mampu menyediakan akses informasi anggaran secara jelas, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya

mengonfirmasi tetapi juga memperkuat sejumlah bukti empiris bahwa transparansi dan akuntabilitas anggaran merupakan faktor strategis yang memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat Kota Palangka Raya terhadap kinerja DPR.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran DPR memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Tingkat Kepuasan Masyarakat Kota Palangka Raya. Semakin terbuka proses penyusunan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban anggaran yang dilakukan oleh DPR, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga tersebut. Hasil ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menekankan bahwa transparansi informasi dan akuntabilitas publik merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat kualitas pelayanan pemerintahan. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas anggaran menjadi elemen strategis dalam membangun pemerintahan yang responsif, terpercaya, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar DPR terus meningkatkan transparansi anggaran melalui penyediaan informasi yang lengkap, mudah diakses, dan disajikan secara berkala kepada masyarakat. Selain itu, akuntabilitas perlu diperkuat melalui mekanisme pengawasan yang jelas, pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi anggaran. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti partisipasi masyarakat, kualitas pelayanan publik, atau integritas lembaga guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad, S. N. (2025). Responsivitas Pelayanan Publik di Era Digital: Evaluasi Peran Institusi dalam Penanganan Cyber Sexual Harassment (Studi Kasus Grup Facebook "Fantasi Sedarah"). *Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 2(2), 70–91.
- Aisyah, S. D., Yuniningsih, T., & Djumiarti, T. (2025). Efektivitas Program Pelayanan Posyandu Lansia Di Puskesmas Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(1), 1–10.
- Ali, M. M., Hariyati, T., Pratiwi, M. Y., & Afifah, S. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapan Nya Dalam Penelitian. *Education Journal.*, 2(2), 1–10.
- Anggreni, N. (2023). Akibat Hukum atas Alokasi Anggaran Pendidikan yang Kurang dari 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 2(1), 195–215. <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i1.425>
- Avina, A. W. (2023). Model Transparansi Anggaran Desa Di Yogyakarta. *Polistaat*, 6(2), 1–20.
- Briyadi, P., Mustofah, A., & Pramudiana, I. D. (2025). Smart Desa, Layanan Cerdas: Inovasi Digitalisasi Pelayanan Administrasi di Desa Sabrang, Klaten. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(4), 143–163.
- Fathia, S. N. (2025). Hubungan Antara Transparansi Anggaran dan Partisipasi Publik Dalam Green Budgeting Pemerintah Pusat. *Gemilang: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 366–385.
- Hadi, U., Munawarah, & Affrian, R. (2024). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Pada Upt Puskesmas Awayan Kabupaten Balangan. *JURNAL PELAYANAN PUBLIK*, 1(4), 1617–1627.
- Hasnidar, Wawo, A. B., Hadisantoso, E., Purnaman, S. M. N., & Awal, T. S. (2025). Pengolahan Data Dengan Aplikasi Smartpls 4 (Metodologi Penelitian Kuantitatif). *Eureka Media Aksara*.
- Irawati, Jumaidi, & Paulina, S. (2025). Efektivitas Penggunaan E-Katalog Dalam Pengadaan Barang Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Pelayanan Publik*, 5(4), 212–221.
- Jane, O., & Pawitan, G. (2025). Local Empowerment, Global Attraction: Sustainable Strategies for

- Rural Tourism Development in Indonesia Through Village-Owned Enterprise. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 09(01).
- Jayanti, N. A. D., & Trisnainingsih, S. (2022). Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa. Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 13(2), 550–560.
- Kawatu, A. S. F., Tirayoh, V. Z., & Datu, C. (2024). Evaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pineleng Dua Indah Kecamatan Pineleng. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(4), 299–308. <https://doi.org/10.58784/rapi.192>
- Kurniadi, D., & Sutabri, T. (2025). Penerapan Aplikasi Samsat Digital sebagai Layanan Publik di Sumatera Selatan. *Switch: Jurnal Sains Dan Teknologi Informasi*, 3(1), 49–56.
- Lutfie, M., Saprudin, & Nathalya, S. (2025). Konsep Peningkatan Kualitas Pelayanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhan Ratu Melalui Inovasi Teknologi. *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), 2575–2587.
- Mariska, R., Umami, R., & Sofiah. (2025). Strategi Pengelolaan Aset pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Meningkatkan PAD di UPT BLK Jember. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, 4(5), 466–479.
- Masita. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In Yayasan Penerbit Muhammad Zaini (BAB VII PO).
- Maulidiah, S. (2025). *Pelayanan Publik*. CV. Indra Prahasta.
- Mursalin, M., Natsir, N., & Anas, M. (2024). Efektivitas Reformasi Birokrasi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Student Research Journal*, 2(4), 397–406.
- Nurhidayati. (2023). Determinan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dalam Sewindu Dana Desa. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 139–156.
- Prihartono, D. (2023). Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Governance Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(2), 192–201.
- Saffa, K. A., Arastha, A., Fazilatunnisa, G., Kautsar, M. F. al, & Lukman, F. (2025). Transformasi Birokrasi Digital melalui Inovasi Kebijakan: Studi Kualitatif atas Implementasi Aplikasi M-Paspor di Indonesia. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2.
- Saifulloh, M., Toruan, R. R. M. L., & Prihatiningsih, N. (2022). Komunikasi Pelayanan Publik Kepolisian Polda Banten Melalui Program Training of Trainer (ToT). *Jurnal Pustaka Dianmas*, 2(2), 33–41.
- Sari, P. D., Karimah, R. A. Al, & Salsabilla, S. (2024). Efektivitas Aplikasi M-Paspor Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 9(1), 169–173.
- Sedarmayanti. (2025). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik). PT. Refika Aditama.
- Sembiring, E. B., & Fitriati, R. (2025). Digital Governance Of Asset Management, A Study Of The Planning Bureau At The Indonesian Attorney General's Office. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 6(4), 6931–6944.
- Setiadi, A. (2022). Analisis Digital Leadership Dan Transformasi Digital Dalam Peningkatan Pelayanan Publik. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(12), 1–20.
- Suryana, T. M. F., Rahmawati, A. A., Ramdanti, N. S., & Safitri, A. N. (2025). Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik: Tinjauan Yuridis terhadap SPBE di Indonesia. *Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik*, 4(1), 37–53.
- Teriraun, C., Permana, D., & Nuradhawati, R. (2025). Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon. *Jurnal Prinsip*, 1(2), 1–10.
- Warsdapama, G. Z., Nurmandi, A., & Fridayani, H. D. (2024). Digitalisasi Daerah: Implementasi Pelayanan Publik Di Kota Semarang Berbasis Smart City Dimensi Smart Government. *JIHHP*, 4(5), 1299–1311.
- Wibowo, A. T., & Susliyanti, E. D. (2024). Pengaruh Transparansi Anggaran Dan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. *Litera: Jurnal Literasi Akuntansi*, 4(2), 67–76.

<https://doi.org/10.55587/jla.v4i2.116>

Wulandari, N. T., & Darma, G. S. (2025). The Effectiveness of Accreditation in Establishing Quality Culture Changes in Community Health Centre: A Case Study in Bali Province. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 09(01).